

PENGUATAN EKONOMI RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI HALAL MELALUI PERAN WANITA DI WILAYAH PESISIR

**Penulis:
Misdawita
Lapeti Sari
Bunga Chintia Utami**



GETPRESS INDONESIA

PENGUATAN EKONOMI RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI HALAL MELALUI PERAN WANITA DI WILAYAH PESISIR

Penulis: Misdawita

Lapeti Sari

Bunga Chintia Utami

ISBN:

Editor: Diana Purnama Sari, M.E.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak: Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit : GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya Peneliti telah dapat menyelesaikan buku “Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Dan Industri Halal Melalui Peran Wanita di Wilayah Pesisir”. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai peran wanita di wilayah pesisir Provinsi Riau.

Buku ini dibuat sebagai respons atas maraknya isu-isu dari berbagai pihak dan kalangan tentang industri halal yang memiliki potensi besar pada saat ini. Selain itu, bagaimana peran wanita dapat membantu menguatkan ekonomi rumah tangga dan keberadaan industri halal di Indonesia.

Buku ini berusaha untuk mengupas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan wanita bekerja dan keputusan kepemilikan sertifikat halal pada UMKM di wilayah pesisir Provinsi Riau dengan pelaku usaha wanita. Dengan bekerja seorang wanita dapat menguatkan perekonomian keluarga. Dan dengan kepemilikan sertifikat halal pelaku usaha wanita akan dapat menguatkan keberadaan industri halal di wilayah pesisir.

Saya berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait dengan peran wanita, perekonomian keluarga, dan UMKM halal, khususnya di wilayah pesisir.

Akhir kata, Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Peneliti melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap melalui buku ini dapat mengoptimalkan peran wanita dalam perekonomian keluarga dan pengembangan industri halal di Indonesia khususnya di wilayah pesisir.

Pekanbaru, Agustus 2023

DAFTAR ISI

PRAKATA	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ii</i>
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERAN WANITA DALAM PESPEKTIF GENDER DAN PEMBANGUNAN.....	9
BAB 3 TENAGA KERJA WANITA.....	21
BAB 4 KEWIRAUSAHAAN WANITA.....	27
BAB 5 INDUSTRI HALAL	32
BAB 6 MODEL REGRESI LOGISTIK.....	39
6.1 Definisi Analisis Regresi Logistik	39
6.2 Syarat Analisis Regresi Logistik.....	41
6.3 Model Persamaan Regresi Logistik.....	43
6.4 Pengujian Hipotesis Pada Regresi Logistik.....	45
BAB 7 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WANITA BEKERJA DI WILAYAH PESISIR .	48
BAB 8 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPEMILIKIAN SERTIFIKAT HALAL	54
PROFIL PENULIS.....	69

BAB 1

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di bidang ekonomi banyak dilakukan PHK, banyak pekerja harian pelaku ekonomi tingkat bawah tidak dapat bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan. Menyikapi kondisi serta tuntutan ekonomi yang semakin tinggi maka yang berperan untuk mencari nafkah dalam rumah tangga bukan saja laki-laki tetapi juga wanita. Akibatnya semua anggota rumah tangga berperan aktif atas keberlangsungan hidup keluarga, khususnya dalam aktivitas ekonomi.

Aktivitas ekonomi pada saat ini tidak hanya didominasi oleh laki-laki, namun juga wanita. Bahkan peningkatan peran wanita dalam bidang ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan di suatu negara. Partisipasi wanita memiliki peran penting dalam mengelola keuangan keluarga, khususnya di daerah pesisir yang tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi.

Wilayah pesisir adalah wilayah yang memiliki kekhasan tersendiri. Setiap harinya wilayah pesisir di dominasi oleh penduduk wanita dan anak-anak karena umumnya suami dan remaja pria pergi mencari hasil laut atau sungai. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan lebih di titik beratkan pada kaum wanita. Wanita-wanita di daerah pesisir dapat menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi produktif masyarakat pesisir sehingga meningkatkan fungsinya dari ibu rumah tangga biasa menjadi pencari nafkah.

Tekanan ekonomi yang terlalu kuat pada daerah pesisir seringkali mendorong eksploitasi pekerja anak dan wanita. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin menyebabkan terjadinya pewarisan kemiskinan antargenerasi. Adapun jumlah penduduk miskin di Rokan Hilir berdasarkan data penduduk/keluarga miskin yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BP) Propinsi Riau pada tahun 2020, menunjukkan bahwa penduduk miskin 51,97 juta jiwa yang merupakan penduduk miskin urutan tertinggi ketiga di Provinsi Riau.

Berdasarkan perpektif ekonomi, peran wanita masih cukup rendah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, laki-laki dan wanita memiliki potensi namun potensi kaum wanita tidak teraktualisasi secara maksimal, lemahnya partisipasi masyarakat khususnya kaum wanita dalam pengambilan keputusan, karena pada umumnya masyarakat

miskin ini sulit dilibatkan dalam berbagai keputusan serta pola hubungan kerja.

Ditinjau dari perspektif gender dalam pengelolaan wilayah pesisir yang masih bias gender (masih belum melibatkan wanita), yang mengakibatkan kaum wanita tidak berperan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Untuk itu dalam penguatan ekonomi keluarga terutama di masa pandemi COVID-19 ini diperlukan peran bersama antara laki-laki dan wanita di wilayah pesisir.

Selain dampak ke rumah tangga pandemi covid-19 di Indonesia juga memberikan dampak yang signifikan terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM ini rentan terdampak dalam gangguan ekonomi, sebab mereka berhubungan langsung dengan industri kuliner, sektor pariwisata, serta sektor transportasi. Hal ini karena mereka memerlukan supplier dengan cepat, namun semuanya terdampak secara signifikan oleh covid-19 (Hardilawati, 2020). Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global, termasuk Indonesia, memberikan kesempatan kepada perkembangan keuangan dan ekonomi syariah. Salah satu potensi dalam ekonomi syariah yang perlu dimanfaatkan dari adalah terkait dengan industri halal (Kamila, 2021).

Prospek industri halal yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa industri halal menjadi tren global saat ini. *State of The Global Islamic Report* (2019) menyatakan bahwa

penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal saat ini ada sekitar 1,8 miliar. Dengan total pengeluaran konsumen sebesar 2,2 triliun dolar, peluang konsumen industri halal meningkat sebesar 5,2 persen setiap tahun dan diperkirakan akan terus meningkat. Proyeksi CAGR gabungan industri halal akan meningkat hingga 6,2 persen dari 2018 hingga 2024, dan total dana yang dihabiskan oleh konsumen industri halal juga akan meningkat hingga mencapai 3,2 triliun dolar pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa industri halal memiliki prospek yang cerah ke depannya. (Reuters and Standard, 2015).

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor halal. Potensi besar ini disebabkan oleh banyaknya orang Muslim di Indonesia. Indonesia menyumbang 12,7% dari total populasi muslim dunia, dengan 87,2% dari total populasi. Karena banyaknya populasi muslim, permintaan terhadap produk halal juga tinggi. Indonesia digambarkan sebagai representasi pasar industri halal global. Bahkan pada tahun 2017, Indonesia membelanjakan total USD 218,8 miliar untuk produk halal. Industri halal memiliki potensi strategis untuk meningkatkan ekonomi. Jadi, industri halal di Indonesia harus dikembangkan. Setiap tahun, industri halal menyumbang USD 3,8 miliar ke PDB Indonesia. Selain itu, industri halal telah menarik investasi USD 1 miliar dari investor asing dan menciptakan 127 ribu pekerjaan baru setiap tahunnya. Industri halal dapat meningkatkan ekspor dan cadangan devisa

negara jika dioptimalkan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Salah satu provinsi di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan industri halal adalah Provinsi Riau. Kementerian Pariwisata Indonesia mempersiapkan Provinsi Riau sebagai salah satu dari sepuluh provinsi untuk menjadi tempat wisata halal. Pemilihan ini pasti memiliki alasan. Riau, sebagai rumah Melayu, memiliki budaya, adat istiadat, dan literatur yang sangat terikat dengan Islam, termasuk huruf arab melayu dan buku Tunjuk Ajar Melayu. Provinsi Riau memiliki lokasi yang sangat menguntungkan di mana ia berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, yang memungkinkan pengembangan berbagai jenis hubungan ekonomi, termasuk industri halal (Bustamam and Suryani, 2021). Riau memiliki banyak wilayah pesisir yang perlu dikembangkan ekonomi rumah tangga dan industri halalnya.

Beberapa wilayah pesisir di Provinsi Riau terkenal dengan perikanan dan produk olahannya, seperti kerupuk ikan dan ikan asin, serta industri rumah tangga dengan berbagai usaha, seperti kain tenun, dodol, dan yang paling terkenal adalah lempuk durian. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) menjual barang mereka ke negara tetangga seperti Malaysia (Suyadi, Syahdanur and Suryani, 2018). Oleh karena itu, Provinsi Riau masih menjadi salah satu Provinsi yang memiliki potensi yang besar untuk berkembangnya industri halal di wilayah pesisir.

Wirausaha wanita atau wirausaha wannita merupakan salah satu target yang dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor industri di wilayah pesisir Provinsi Riau khususnya industri halal, hal ini disebabkan karena hampir 90% industri kecil menengah dikelola atau melibatkan wanita secara langsung. Wanita memiliki semangat untuk berwirausaha dengan adanya pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan merupakan pondasi mendasar bagi wanita untuk menjadi pengusaha (Bachri *et al.*, 2022).

Tidak diragukan lagi bahwa wanita memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan usaha karena mereka memiliki beberapa kelebihan dalam menjalankan usahanya, seperti lebih banyak memiliki hubungan dibandingkan pria dan sangat jeli dalam melihat peluang usaha karena mereka terbiasa dengan hal-hal kecil, sehingga keahlian ini sangat penting untuk membuat produk yang menarik (Vanomy and Harris, 2021).

Di Indonesia wirausaha wanita merupakan penyumbang yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi domestik. Laporan statistik dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari 2 juta unit usaha mikro, 40,8% dikendalikan oleh wanita. Dari total 5,5 juta tempat kerja di industri berukuran kecil dan rumahan, 45% dari tenaga kerja tersebut adalah wanita. Menurut Asia Foundation, 35% usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia dimiliki oleh wanita. Indonesia adalah

negara yang paling banyak memiliki wanita yang bekerja sebagai pengusaha UKM di wilayah Asia-Pasifik. (Jamil and Mardiah, 2017).

Dalam mengembangkan usaha, wirausaha wanita membutuhkan kemampuan memanfaatkan teknologi, kemampuan bersaing serta kemampuan berinovasi agar dapat meningkatkan kinerja usahanya. Wirausaha wanita di Indonesia pada umumnya masih menggunakan teknologi yang sederhana/manual dan mengalami keterbatasan modal (Bachri *et al.*, 2022). Namun, pengalaman dan kemampuan wirausaha wanita yang telah cukup banyak dibidang usaha yang digeluti, dapat menjadi asset yang dapat mengembangkan potensi industri halal yang dimiliki Indonesia khususnya wilayah Pesisir Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran wanita dalam penguatan ekonomi rumah tangga dan industri halal di wilayah pesisir Provinsi Riau; serta untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan wanita bekerja dan kepemilikan sertifikat halal pada UMKM pelaku usaha wanita di wilayah pesisir.

Penyusunan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis peran wanita dalam penguatan ekonomi rumah tangga dan industri halal di wilayah pesisir. Melalui penelitian ini akan diketahui mengetahui faktor – faktor apa saja yang

mempengaruhi keputusan wanita bekerja dan kepemilikan sertifikat halal pada UMKM pelaku usaha wanita di wilayah pesisir sehingga dapat menjadi bahan masukan/ pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau khususnya di wilayah pesisir dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan dalam rangka meningkatkan potensi wanita untuk menguatkan perekonomian rumah tangga dan industri halal khususnya pada industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah pesisir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Provinsi Riau khususnya.

BAB 2

PERAN WANITA DALAM PESPEKTIF GENDER DAN PEMBANGUNAN

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan wanita dari sudut non-biologis seperti lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Artinya gender merujuk pada peran yang dilakukan dalam aktivitas antara laki-laki dan wanita secara budaya. Analisis gender memanfaatkan data dan informasi tentang gender yang terpilah antara laki-laki dan perempuan mengenai akses, peran, kontrol, dan keuntungan (Yusrini, 2017).

Gender berasal dari kata “gender” (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan social budaya dan psikologis. Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai social budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati (Sudarta, 2014).

Kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda dalam setiap masyarakat. Mereka memiliki

pekerjaan yang berbeda dalam komunitasnya, dan status serta kekuasaan mereka mungkin juga berbeda. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perkembangan peran gender yang berbeda dalam masyarakat seperti faktor lingkungan alam, kisah, dan mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki tentang perbedaan jenis kelamin, mengapa mereka muncul, dan bagaimana orang berlainan jenis kelamin berhubungan satu sama lainnya dan dengan alam sekitarnya.

Konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat laki-laki sebagai superior sedangkan wanita berada pada tataran subordinat. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari keadaan atau kondisi sosial ekonomi keluarga. Keluarga dapat memajemen dalam pengelolaan pendapatan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita saat ini dapat bekerja mencari penghasilan dalam kesepakatan bersama. Peran wanita dalam sebuah keluarga juga sangat penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga (Hanum and Safuridar, 2018).

Keberadaan wanita memiliki peran penting baik pada ranah domestik (keluarga) yaitu mengelola keuangan keluarga dari hasil pendapatan suami demi berlangsungnya ekonomi keluarga dan ranah publik (masyarakat), wanita mampu mendayagunakan sumber ekonomi melalui pemanfaatan stok modal sosial yang dimilikinya dalam lingkungan sosial untuk

mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga (Puspitasari, 2012).

Berkaitan dengan gender, dikenal ada tiga jenis peran gender sebagai berikut (Sudarta, 2014):

1. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik.
2. Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lainlain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik.
3. Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Peran wanita secara tradisional masih dialamatkan pada kegiatan non-ekonomi, yaitu peran wanita sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga, namun kenyataannya tidaklah demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat

yang semakin kompleks, maka peran wanita pun turun bergeser. Zaman dahulu kaum lelaki berperan sebagai pencari nafkah (publik), sementara kaum wanita tinggal di rumah mengurus urusan domestik. Tetapi dewasa ini zaman telah berubah. Tidak hanya kaum lelaki yang berkiprah di ranah publik, namun kaum wanita juga telah berperan dalam kegiatan ekonomi dan publik. Peran serta kaum wanita dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena umum yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menjangkau seluruh sistem sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tidak hanya berperan serta dalam sektor domestik rumah tangga, tetapi juga berperan dalam sektor ekonomi dan publik (Tuwu, 2018).

Dalam banyak literatur dijumpai bahwa wanita yang bekerja di sektor publik selalu dikaitkan dengan keadaan ekonomi rumah tangga pekerja wanita. Salah satu alasannya adalah alasan ekonomi dan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan persoalan global. Persoalan kemiskinan sudah berlangsung sejak zaman penjajahan sampai zaman pembangunan. Persoalan tersebut hingga kini belum tuntas dan bahkan semakin sengit diperbincangkan. Tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sampai ke desa-desa.

Wanita merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam pembangunan. Begitu pula para wanita yang tinggal di daerah pesisir. Hanya dalam pengembangannya

mengalami beberapa kendala antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Aktivitas produktif perikanan menunjukkan gejala spesifik peranan gender yang sangat jelas, yaitu laki-laki mendominasi proses penangkapan ikan sedangkan wanita hanya berperan sebagai pengelola pasca tangkap yang nilai tambah ekonomisnya sangatlah rendah.

Peran wanita dalam sektor ekonomi terutama meningkatkan ekonomi keluarga sangat besar ditengah masa pandemi Covid-19. Wanita amat terdampak oleh pandemi COVID-19. Banyak wanita di Indonesia dan di tingkat global bekerja di sektor rentan, seperti ritel, perhotelan atau industri garmen, dan mereka harus kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan jam kerja secara signifikan sejak awal pandemi. Bahkan ada lebih banyak wanita yang menjadi pekerja informal di mana dampak pandemi terhadap mereka sulit diidentifikasi padahal akses mereka ke sistem bantuan sosial terbatas.

Ada berbagai perspektif tentang perempuan dan pembangunan. Pendekatan Pembangunan tersebut adalah WID (*Women in Development*), WAD (*Women and Development*), dan GAD (*Gender and Development*). Perspektif WID berfokus pada mengatasi ketertinggalan perempuan. Karena itu, harus diberi kesempatan sama antara laki-laki dan Perempuan berpartisipasi dalam pendidikan, karir, dan aspek kehidupan lainnya.

Pergeseran paradigma pembangunan dari pengembangan yang berpusat pada produksi ke pengembangan yang berpusat pada orang harus diselaraskan dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Menurut Shalihin (2019) meskipun kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi sangat signifikan, peran mereka hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi politik. Shalihin menjelaskan perempuan hanya menerima 10% dari gaji mereka meskipun mereka memberikan 66% dari jam kerjanya. Sementara perempuan menguasai hanya 1% dari material goods saat ini, mereka bertanggung jawab atas 30% produksi pangan sedunia. Hasil kontribusinya terhadap produksi nasional kurang dinikmati oleh perempuan. Perempuan memiliki upah rata-rata lebih rendah dari laki-laki, tetapi memiliki perlindungan hukum yang lebih baik daripada laki-laki, dan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bekerja daripada pria. Laki-laki memiliki akses yang lebih besar ke sumber produksi daripada perempuan.

Pengembangan sumber daya manusia berfokus pada sumber pembangunan dapat dianggap merugikan perempuan. Metode ini tidak hanya berfokus pada pembentukan orang yang terampil dan profesional yang sesuai dengan sistem produksi. Sebaliknya, itu lebih berfokus pada mengembangkan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Dengan pemahaman ini, manusia tidak hanya dilihat

sebagai objek pembangunan; sebaliknya, mereka dilihat sebagai faktor yang menentukan, corak, dan arah pembangunan (Shalihin and Firdaus, 2019).

Pembangunan gender yang adil adalah pembangunan yang mampu merespon perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki, baik karena faktor biologisnya maupun karena faktor konstruksi sosial budayanya. Perempuan dan laki-laki berbeda secara biologis maupun secara konstruksi sosial budayanya. Secara biologis, perempuan memiliki ciri-ciri dan fungsi reproduksi yang berbeda karena itu perempuan punya kebutuhan yang berbeda pula (Nurhaeni *et al.*, 2022).

Masalah ketimpangan gender dihadapi oleh hampir semua negara, inilah kemudian menjadi pendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Kesetaraan Gender dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang meliputi 17 Tujuan Pembangunan. Gender masuk dalam SDGs poin kelima, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuannya adalah mengakhiri kekerasan dan diskriminasi perempuan serta memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan (Nurhaeni *et al.*, 2022). Beberapa poin penting SDGs terkait gender adalah sebagai berikut :

1. Menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana pun.

2. Menghapuskan kekerasan kepada perempuan dan anak perempuan di ruang privat dan publik termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual dan eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan hal-hal yang merugikan seperti perkawinan anak, perkawinan paksa anak dan sunat perempuan.
4. Menghargai pekerja rumah yang tidak dibayar dan bekerja melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan perlindungan sosial, dan mendorong pembagian tanggung jawab rumah tangga secara tepat di tingkat nasional.
5. Menjamin seluruh perempuan bisa berpartisipasi penuh dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin
6. Menjamin akses terhadap kesehatan seksual dan reproduksi sesuai disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional.
7. Melakukan reformasi ekonomi untuk memastikan perempuan memiliki hak yang sama pada sumber daya ekonomi dan akses terhadap kepemilikan dan kendali hak miliknya

Perhatian global terhadap perempuan dimulai dengan diberlakukannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, diikuti oleh deklarasi dan

konvensi lainnya. Salah satu konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan perempuan muncul pada tahun itu, dilampirkan pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)) yang juga dikenal dengan istilah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW menjadi dasar hukum bagi hak-hak perempuan. Hak asasi perempuan kemudian diproklamirkan kembali pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995. Skor kesenjangan gender secara keseluruhan pada tahun 2023 untuk 146 negara mencapai 68,4 dengan sampel tidak berubah termasuk 145 negara yang masuk dalam edisi 2022 dan 2023. Skor tersebut meningkat dari 68,1 % menjadi 68,4%, naik 0,3 poin persentase dari tahun lalu. Implementasi kebijakan pembangunan yang mencakup partisipasi perempuan dapat dilihat pada implementasi pengarusutamaan gender di daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan, yang saat ini mengarusutamakan gender di daerah, kemudian diubah menjadi Kementerian. Urusan Dalam Negeri. Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Pemerintahan Daerah.

Pengarusutamaan gender dalam aspek pembangunan merupakan salah satu bentuk pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses penguatan implementasi PUG selain meningkatkan komitmen pengambil kebijakan, menyediakan alat analisis dan memperkuat kelembagaan PUG. Memang, untuk menyempurnakan implementasi PUG, setiap daerah telah menerbitkan Peraturan Daerahnya masing-masing. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah menyiapkan modul pelatihan yang mencakup peraturan Permendagri no. 54 Tahun 2010 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Modul pelatihan yang dibuat oleh KPP&PA ini juga memuat panduan PPRG bagi perencana dan penyusun anggaran daerah.

Dalam perencanaan pembangunan, beberapa indikator digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dan partisipasi gender. Beberapa indikator terkait gender meliputi:

1. Indikator terkait dampak misalnya :

- Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index-GDI*).
- Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measures-GEM*) merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dan kehidupan ekonomi dan politik. Variabel GEM: partisipasi perempuan dalam politik, partisipasi dalam bidang ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama terkait dengan tujuan lima, yakni mendorong kesetaraan gender.

2. Indikator terkait output misalnya:

- populasi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas;
- jumlah rumah tangga miskin yang mendapat pelayanan listrik maupun air bersih,
- jumlah pekerja laki-laki dan perempuan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja

- Rasio laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelatihan agriusaha,
- Rasio jumlah laki-laki dan perempuan dalam berwirausaha dan lain sebagainya

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan terkait gender disempurnakan dengan peraturan daerah, seperti Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender di Provinsi. Pembangunan Daerah, Peraturan Walikota Pekanbaru No. 41 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pengarusutamaan Gender Tahun 2018-2022 dan Peraturan Bupati Wilayah pesisir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender di Kerajaan Wilayah pesisir dan Peraturan Lainnya.

BAB 3

TENAGA KERJA WANITA

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja." dan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Yusrini, 2017).

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian "Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat."

Sehingga definisi tenaga kerja wanita adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan di dalam ataupun di luar hubungan kerja dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Pekerja wanita atau buruh wanita yang bekerja di perusahaan saat sekarang ini mengalami situasi dramatis. Situasi dilematis secara progresif cenderung memiliki dampak "marginalisasi" dan "privatisasi" pekerjaan wanita, serta mengkonsentrasikan di dalam bentuk pekerjaan pelayanan yang tidak produktif. Kenyataan ini menimbulkan fenomena menurunnya posisi kaum wanita dalam bidang pekerjaan (Prayitno, 2003).

Motif wanita dalam bekerja ada 3 secara teoritis, yaitu :

1. Wanita yang bekerja dengan alasan motivasi ekonomi semata. Hal ini dilatar belakangi oleh kurangnya jaminan kebutuhan hidup bagi dirinya maupun keluarganya yang seharusnya diperoleh dari suami.
2. Wanita yang bekerja dengan alasan motivasi menggunakan keahlian, kebanggaan, dan kesenangan. Wanita yang bekerja dengan alasan ini biasanya memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik.
3. Wanita yang bekerja karena bakat dan juga keahlian. Wanita yang bekerja karena bakat dan keahlian biasanya

memiliki pendidikan tinggi serta terlepas dari motivasi ekonomi dan kebanggan.

Menurut Rini (2002) menjalani peran sebagai karyawan dan sebagai ibu rumah tangga mendatangkan banyak persoalan yang dialami oleh para wanita, yang juga sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah. Tuntutan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai tenaga kerja wanita semakin sulit dimainkan secara seimbang, keduanya saling tarik dan membuat wanita bekerja kesulitan untuk melakukan manajemen peran dan manajemen waktu. Secara umum, terdapat tiga faktor yang biasanya menjadi sumber persoalan bagi para ibu yang bekerja adalah faktor internal, faktor eksternal dan faktor relasional.

Faktor internal yaitu persoalan yang timbul dalam diri berupa keadaan ekonomi yang menuntut wanita untuk bekerja, untuk menyokong keuangan keluarga. Faktor Eksternal, yaitu dukungan suami, tanggung jawab pengasuhan anak dan aturan kerja. Sementara kenyataan budaya Indonesia yang patrilineal cenderung menghambat perpaduan pelaksanaan tuntutan ketiga faktor eksternal tersebut. Ketiga, faktor relasional. Hal ini berhubungan dengan waktu untuk menjalin dan mempertahankan kebersamaan dengan suami dan anak-anak menjadi lebih terbatas dengan tersitanya waktu untuk bekerja.

Wanita yang bekerja menghabiskan rata-rata 7 sampai 9 jam dalam satu hari, atau 42 sampai 54 jam dalam satu minggu di kantor. Berarti mereka hanya memiliki sisa waktu dua pertiga dari wanita yang tidak bekerja. Waktu ini masih harus ia atur untuk pengasuhan anak, mengurus suami, bersosialisasi dengan keluarga besar dan lingkungan sosial, serta untuk mengurus diri mereka sendiri. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah terbaginya waktu dan perhatian antara urusan di rumah tangga dan urusan pekerjaan di kantor. Bagi para wanita, waktu kerja yang panjang ditambah oleh tuntutan pekerjaan rumah tangga menyulitkan mereka untuk mengasuh anak dan mewujudkan attentive parenting (Rosiana, 2007).

Bekerja mempunyai manfaat positif bagi wanitabekerja maupun bagi keluarga. Beberapa segi positifnya adalah (Rini, 2002):

1. Mendukung ekonomi rumah tangga.

Dengan bekerjanya istri, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu dari suami saja, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.

2. Meningkatnya harga diri dan pemantapan identitas.

Dalam bekerja, memungkinkan bagi seorang wanita untuk mengekspresikan dirinya sendiri, dengan cara yang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebanggaan terhadap diri sendiri, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Melalui bekerja, wanitaberusaha menemukan arti dan identitas dirinya; dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

3. Relasi yang sehat dan positif dengan keluarga.

Wanita yang bekerja, cenderung mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan bervariasi, sehingga cenderung mempunyai pola pikir yang lebih terbuka, lebih energik, mempunyai wawasan yang luas dan lebih dinamis. Dengan demikian, keberadaan istri bisa menjadi partner bagi suami, untuk menjadi teman bertukar pikiran, serta saling membagi harapan, pandangan dan tanggung jawab.

4. Pemenuhan kebutuhan sosial

Setiap manusia, termasuk para ibu, mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan “kebersamaan” dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Bagaimana pun

juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas, untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial. Hal yang terpenting, adalah untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan stres, baik dari masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan kerja, mereka dapat saling sharing, berbagi perasaan, pandangan dan solusi.

5. Peningkatan skill dan kompetensi.

Dengan bekerja, maka seorang wanita harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik tuntutan tanggung jawab maupun tuntutan skill dan kompetensi. Untuk itu, seorang wanita dituntut untuk secara kreatif menemukan segi-segi yang bisa dikembangkan demi kemajuan dirinya. Peningkatan skill dan kompetensi yang terus menerus akan mendatangkan nilai lebih pada dirinya sebagai seorang karyawan, selain rasa percaya diri yang mantap.

BAB 4

KEWIRAUSAHAAN WANITA

Kewirausahaan bukan hanya sekedar penciptaan usaha, melainkan termasuk mencari peluang, mengambil risiko, memiliki kegigihan untuk mendapatkan ide dan menjadikannya realitas. Lebih jauh kewirausahaan merupakan konsep usaha terintegrasi yang menembus individu dengan cara yang inovatif (Kuratko and Audretsch, 2009). Sedangkan wirausahawan berasal dari bahasa Perancis yaitu "*entreprendre*" yang berarti "untuk melakukan." Wirausahawan adalah orang yang mampu untuk mengatur, mengelola, dan mengambil resiko usaha.

Selain itu, disebutkan bahwa kewirausahaan, juga dikenal sebagai *entrepreneurship*, adalah sebuah proses yang selalu berubah, mengubah, dan menciptakan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengaplikasian semangat dan energi untuk mengembangkan dan menerapkan solusi kreatif. Kewirausahaan termasuk keinginan untuk mengambil risiko, kemampuan untuk membangun tim usaha yang efektif, kemampuan untuk membangun rencana usaha yang kuat, dan visi untuk menemukan peluang di mana orang lain hanya melihat kekacauan, ancaman, dan kebingungan (Bastaman and Juffiasari, 2015).

Jumlah wanita yang bekerja dalam usaha di seluruh dunia telah meningkat secara signifikan. Disebut wirausaha wanita karena wanita tersebut berperan dan terlibat dalam membuat keputusan sendiri yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Selain itu, wanita-wanita ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan meskipun usaha yang dijalani masih berukuran relatif kecil. Selain itu, *Global Entrepreneurship Monitor* mengungkapkan konsep *necessity entrepreneurship* dan *opportunity entrepreneurship*. *Necessity entrepreneurship* menggambarkan orang-orang yang melakukan usaha karena berusaha adalah pilihan. *Opportunity entrepreneurship* adalah individu yang berusaha karena melihat peluang usaha (Hapsari and Nurhajjah, 2020).

Kewirausahaan merupakan sikap yang dimiliki seseorang yang memiliki keberanian besar dalam mengambil resiko untuk memulai sebuah usaha, sebab orang yang berani mengambil resiko percaya dan mampu secara mandiri memulai dan menjalankan usaha tanpa takut dengan terjadinya kegagalan. seseorang yang berani merencanakan dengan cermat apa yang akan dilakukannya dalam suatu usaha dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk yakin bahwa usaha itu akan berhasil. Pandemi COVID-19 telah menjadikan wirausaha dan kewirausahaan sebagai subjek yang paling banyak dibicarakan dalam media saat ini. Semua orang berani masuk ke dunia

wirausaha. Namun, pengusaha wanita masih dipandang sebelah mata di bidang ini. (Hasanah *et al.*, 2022).

Kesenjangan gender dalam dunia wirausaha ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia; itu juga terjadi di beberapa negara maju. Bagi beberapa wanita, perbedaan gender masih menjadi hambatan dalam dunia wirausaha karena adanya unsur-unsur negatif, seperti keraguan akan kemampuan wanita untuk memiliki dan mengelola usaha mereka sendiri. (Adha *et al.*, 2020). Selain itu, tradisi keluarga yang ketat sering menghalangi wanita yang berwirausaha untuk berkembang dan mengembangkan usaha mereka (Adom and Anambane, 2019).

Wanita memiliki peran penting baik di rumah maupun di lingkungan publik; mereka mampu memanfaatkan sumber ekonomi dengan berwirausaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Wanita adalah sumber daya manusia yang sangat potensial untuk membangun industri halal di daerah pantai. Namun, wanita berwirausaha masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang disebabkan oleh keterampilan dan pendidikan yang rendah. (Misdawita and Utami, 2022).

Beberapa keuntungan wanita dalam menjalankan usaha adalah sebagai berikut:

a. Ketahanan

Wanita biasanya lebih telaten dalam menjalankan usaha mereka. Mereka pantang menyerah dan lebih sabar jika

usaha mereka gagal. Wanita memiliki kemampuan untuk membuat produk lebih menarik dan memiliki daya beli tinggi.

b. Sistem Komunikasi

Wanita biasanya mudah bergaul, memiliki mekanisme pendekatan yang memungkinkan mereka bergabung dengan jaringan yang lebih luas, dan mereka juga lebih jeli terhadap peluang usaha yang muncul dari jaringan usaha mereka.

c. Keberanian

Ketika wanita menghadapi kehilangan pekerjaan, mereka biasanya tidak mudah putus asa. Mereka biasanya melihat kegagalan tersebut dengan cara berusaha menggunakan pengalaman yang mereka miliki.

Beberapa strategi wirausaha wanita agar dapat bersaing adalah sebagai berikut :

1. Selalu berusaha meningkatkan kualitas produk, baik barang atau jasa.
2. Harus selalu dapat menjaga pelayanan yang baik bagi konsumen, agar mendapatkan kepercayaan dari konsumen.
3. Harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam berusaha karena dengan teknologi dapat menjadi solusi bagi wirausaha wanita yang juga memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga.

Wanita dapat melakukan banyak hal baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain dengan berwirausaha. Sebagai wanita diharapkan mampu menjadi ibu yang terus menambah pengetahuan dalam pengelolaan keluarga dan rumah tangga. Selain itu juga sekaligus selalu mengikuti perkembangan dunia usaha. Berkegiatan dalam kewirausahaan akan sangat berpotensi sebagai pendorong proses pemberdayaan wanita.

BAB 5

INDUSTRI HALAL

Halal berasal dari kata Arab, yaitu *halla*, *hillan*, *yahillu*, dan "halal", yang berarti apa yang diizinkan atau diizinkan oleh hukum syariah. Dengan demikian, industri halal menganggap produksi produk industri harus sesuai dengan peraturan syariah, yang diizinkan dalam Islam. Menurut konsep syariah, semua yang dimakan oleh muslim, baik makanan maupun non-makanan, harus berasal dari sumber yang halal (Nasution, 2020).

Halal biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. Padahal dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan yang diberi istilah dengan kata Muamalah (Al-Qaradawi, 1960). Standar kualitas yang sesuai dengan hukum Syariah Islamiah dan diterapkan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh orang Muslim yang mana hal ini merupakan definisi dari kata halal itu sendiri (Bohari, Cheng and Fuad, 2013). Halal memiliki arti segala yang dibolehkan oleh syariat Islam, sedangkan haram adalah sebaliknya yakni yang tidak diizinkan oleh syariat Islam (Purnomo, 2016).

Kriteria halal terkait dengan asal, sifat dan metode mengolah makanan (Fouad Ali di dalam Pujayanti, 2020). Pada umumnya, bahkan dari masyarakat muslim sendiri memaknai bahwa halal haram dekat artinya dengan konteks dalam

memproduksi makanan. Padahal, konsep halal haram merupakan bagian kehidupan sehari-hari umat Islam. Untuk itu diperlukan adanya pendalaman literasi halal haram yang artinya seorang konsumen perlu memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan jasa halal dan haram berdasarkan syariah (Pujayanti, 2020). Meskipun halal terkait dengan umat Muslim, itu tidak berarti bahwa pembeli hanya dari umat Islam (Waharini and Purwantini, 2018).

Industri halal merupakan sekelompok perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dengan mengolah bahan baku, baik barang ataupun jasa yang input, proses dan output-nya berpedoman pada syariat Islam. Halal kini menjadi indikator primadona yang bersifat universal sebagai jaminan kualitas suatu produk dan standar hidup (Gillani, Ijaz and Khan, 2016). Bersifat universal karena halal dapat diadopsi oleh siapa saja, bukan hanya muslim melainkan juga dari kalangan non muslim.

Industri halal dalam lingkup sederhana adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Salah satu fungsi industri halal adalah untuk mewujudkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan negara untuk melindungi dan menjamin kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya sehingga perlu kepastian hukum perundang-

undangan sehingga terbentuklah UU tentang Jaminan Produk Halal (Bakar, Pratami and Sukma, 2021).

Namun, untuk memastikan bahwa produk yang ada di masyarakat semuanya aman, perlu dibuat UU tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 UU No 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan, produk halal berarti produk yang dinyatakan halal menurut syariat Islam. (Mujahidin, 2020).

Menurut Indonesia *Halal Lifestyle Center* (IHLC), pemerintah harus memprioritaskan enam bidang dalam industri produk halal saat ini, yang mencakup tidak hanya produk halal tetapi juga gaya hidup halal. Industri halal terdiri dari enam bidang: makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi, dan kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam di bidang ini, karena industri halal mencakup gaya hidup halal dan produk halal. (Reuters and Standard, 2015).

Dalam perkembangannya, produksi industri halal juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti orientasi pada kelestarian lingkungan dan sosial. Sertifikasi halal berfokus pada aspek higienitas, kualitas, dan keamanan produksi dan persiapannya. Sedangkan orientasi kelestarian lingkungan berfokus pada pengurangan dampak negatif dari aktivitas industri terhadap lingkungan. *Green management* atau dikenal

dengan *Environmental Management System* (EMS) merupakan salah satu bagian integral dari industri halal. Tujuannya untuk memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa operasi usaha halal sesuai dengan kepatuhan lingkungan, yakni dikelola dan dikendalikan sesuai dengan pedoman EMS. Proses tersebut mampu mengurangi biaya pengelolaan limbah, penghematan konsumsi energi, biaya distribusi yang rendah, dan peningkatan citra perusahaan (Nisha and Iqbal, 2017). Dengan proses tersebut, pelabelan halal dapat membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan dan menarik konsumen untuk membeli produk halal (Nasution, 2020)

Di seluruh dunia, industri halal terus berkembang. Makanan halal, keuangan, perjalanan, mode, kosmetik, obat-obatan, media dan hiburan, serta perawatan kesehatan dan pendidikan adalah beberapa bidang yang mengalami perkembangan dalam industri halal. Dibandingkan dengan sektor lain, industri makanan halal menghasilkan jumlah uang yang paling besar. Uni Emirat Arab (UEA) adalah negara dengan industri makanan halal terbesar pada tahun 2017. Brasil adalah negara kedua dengan industri makanan halal terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya negara dengan mayoritas penduduk muslim yang mengembangkan pasar industri halal, tetapi juga negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim juga

berusaha mengembangkan pasar industri halal (Mujahidin, 2020).

Populasi muslim Indonesia sangat besar sehingga, industri halal memiliki potensi yang sangat kuat di sini. Beberapa industri halal yang berpotensi seperti makanan halal, keuangan syariah, wisata halal, dan busana muslim (Fathoni, 2020). Terdapat beberapa faktor yang membuat potensi industri halal di Indonesia begitu besar, yaitu: pertumbuhan populasi muslim yang relatif cepat, pertumbuhan *middle-class income* penduduk muslim yang juga cukup besar, banyaknya populasi muslim yang masih muda dan gemar melakukan travelling, akses informasi yang berkembang pesat, fasilitas dan layanan yang ramah dan memuaskan, adanya Ramadhan travel yang menarik minat wisatawan, dan usaha travel yang semakin berkembang dan cepat tanggap terhadap kebutuhan wisatawan (Subarkah, 2018).

Industri halal memiliki keunggulan karena berbasis pada nilai-nilai kebaikan (syariah), seperti kesejahteraan yang sama, tanggung jawab sosial, lingkungan yang ramah, keadilan, investasi yang beretika, dan menghindari ribawi. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika diintegrasikan dengan nilai-nilai agama, membuka jalan bagi 2,8 miliar pelanggan muslim untuk bergabung dengan industri (Azam and Abdullah, 2020). Banyak industri, termasuk makanan dan minuman, kesehatan, pariwisata, kimia, logistik, pemasaran, media elektronik dan cetak, pembiayaan, dan sektor strategis lainnya,

memiliki kesadaran dan potensi pasar untuk industri halal (Nasution, 2020).

Sebagai hasil dari penguatan industri halal, sektor lain yang berfokus pada industri halal akan muncul. Ini akan memungkinkan multiplier yang akan muncul lebih jelas. Sebenarnya, pemerintah telah meluncurkan beberapa undang-undang untuk mendukung industri halal, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selain itu juga telah dibentuk lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang fungsinya adalah(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014):

- i. menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
- ii. menetapkan norma;
- iii. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
- iv. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri; dan
- v. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri yang dijelaskan dalam undang-undang jaminan produk halal.

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi terhadap produk atau jasa sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sertifikasi halal dilakukan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai jaminan bagi umat Muslim yang tinggal di negara non Muslim agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan

agamanya. Halal merupakan persyaratan yang diwajibkan untuk setiap produk dan jasa yang dikonsumsi oleh umat Islam, dan saat ini dipertimbangkan sebagai standar kualitas produk. Standar kualitas halal diterapkan pada proses penyediaan dan produksi makanan, kosmetik, obat-obatan dan produk medis serta diterapkan pula pada pelayanan yang terkait dengan produk halal tersebut (Noordin, Noor and Samicho, 2014).

BAB 6

MODEL REGRESI LOGISTIK

6.1 Definisi Analisis Regresi Logistik

Untuk melihat hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen kategori yang dikotomi atau biner, dapat digunakan analisis regresi logistik. Jenis variabel kategori dikotomi adalah variabel yang memiliki dua nilai yang berbeda, seperti sakit dan tidak sakit; bayi BBLR dan normal; merokok dan tidak merokok; dan sebagainya. Tujuan regresi logistik adalah untuk menentukan apakah variabel bebas atau variabel terikat dapat memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat.

Studi biasanya menggunakan model untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel: variabel X (independent) dan variabel Y (dependent). Regresi linier adalah teknik penelitian yang umum digunakan seperti regresi sederhana atau berganda. Namun, masalah regresi linier dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) yang digunakan kadang-kadang tidak sesuai untuk digunakan. Pelanggaran asumsi Gauss-Markov adalah masalah umum dalam regresi linier. Contoh masalahnya di mana variabel dependent (Y) adalah jenis data nominal, dan variabel bebas/prediktornya (X) adalah jenis data interval atau rasio. Misalnya pada kasus, ingin melihat kepahaman mahasiswa pada

mata kuliah statistika berdasarkan jenis kelamin, umur, uang saku dan konsentrasi perkuliahan. Dalam kasus ini, variabel Y terdiri dari 2 kemungkinan jawaban dari mahasiswa, yaitu mahasiswa yang paham statistika dan mahasiswa tidak paham statistika. Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa tipe data yang digunakan pada variabel terikat merupakan skala nominal, yaitu kategorisasi pemahaman mahasiswa tentang statistika (Misalkan paham statistika diberi angka 1, sedangkan yang tidak paham statistika diberi angka 0). Sedangkan jenis data yang digunakan variabel bebas (X) bisa berupa data interval (skala likert). Jika metode regresi linier biasa digunakan dalam permasalahan ini, maka menurut Kutner, dkk. (2004), akan terjadi dua pelanggaran pada asumsi Gauss-Markov dan satu pelanggaran terhadap batasan dari nilai duga variabel terikat, yaitu:

- a. Tidak terdistribusi normalnya nilai error pada model regresi
- b. Terjadi heteroskedastisitas pada variansi error
- c. Nilai prediksi yang dihasilkan oleh model regresi linier biasa tidak berada pada rentang 0 s.d. 1. Hal ini tentu tidak rasional, karena batasan nilai pada variabel terikat (dalam kasus ini adalah 1 dan 0).

Masalah ini dapat diselesaikan dengan metode Regresi Logistik. Regresi logistik atau model logit pada statistika dapat dimanfaatkan untuk menduga probabilitas kejadian suatu

kejadian dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik.

6.2 Syarat Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik adalah metode untuk membuat model prediksi serupa dengan regresi linear biasa, atau juga dikenal sebagai OLS. Di sisi lain, dalam regresi logistik, peneliti menggunakan skala dikotomi untuk memprediksi variabel terikat. Skala dikotomi adalah skala data nominal yang dikategorikan menjadi dua kategori, seperti besar dan kecil, baik dan buruk, atau berhasil dan gagal. Dalam analisis OLS, asumsi atau syarat bahwa error varians (residual) terdistribusi secara normal adalah wajib. Sebaliknya, regresi logistik tidak membutuhkan asumsi tersebut karena mengikuti distribusi logistik. Berikut kondisi pada regresi logistik:

- a. Hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen tidak diperlukan dalam regresi logistik..
- b. Asumsi normalitas multivariate tidak diperlukan untuk variabel independen. Asumsi homokedastisitas tidak diperlukan
- c. Variabel bebas tidak harus diubah menjadi skala interval atau ratio.
- d. Variabel dependen harus dikotomi (dua kategori)

- e. Variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok
- f. Variabel Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif
- g. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor (independen).
- h. Regresi logistik dapat menyeleksi hubungan, karena pendekatannya adalah non linier log transformasi dengan tujuan memprediksi odds ratio. Odd dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas.

Regresi logistik digunakan pada data dengan variabel dependen yang berbentuk kategori dikotomi, sedangkan regresi linier digunakan jika variabel dependennya numerik. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya secara bersamaan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam regresi logistik, ada istilah Pseudo R Square, yang berarti nilai R Square semu yang maksudnya sama atau identik dengan nilai R Square pada OLS. Berbeda dengan OLS, di mana uji F Anova digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi dan kualitas pembentukan model persamaan, dalam regresi logistik digunakan nilai Chi-Square, yang perhitungannya didasarkan pada perhitungan Maximum Likelihood.

6.3 Model Persamaan Regresi Logistik

Model persamaan regresi linier yang diestimasi menggunakan OLS pada umumnya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_i X_i + e$$

dimana,

Y : Variabel dependen

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_i$: Parameter yang akan diestimasi

$X_1, X_2, \dots, X_3$: Variabel Independen

e : error residual

Dengan regresi logistik, tidak menggunakan interpretasi yang sama seperti halnya persamaan regresi OLS. Model Persamaan yang terbentuk berbeda dengan persamaan OLS. Regresi Logistik dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Regresi Logistik Biner (*Binary Logistic Regression*).

Regresi Logistik biner digunakan ketika hanya ada 2 kemungkinan variabel terikat (Y), contoh misalkan untung dan rugi.

2. Regresi Logistik Multinomial (*Multinomial Logistic Regression*). Regresi Logistik Multinomial digunakan ketika pada variabel terikat (Y) terdapat lebih dari 2 kategorisasi.

Hosmer dan Lameshow menjelaskan bahwa bentuk model regresi logistik dengan $P(Y = 1) = \pi(x)$ adalah :

$$\pi(x) = \frac{\exp(g(x))}{1 + \exp(g(x))}$$

dengan $g(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p$

dimana,

$\pi(x)$ = Peluang Kejadian bernilai 1

β_0 = Konstanta

β_i = Koefisien regresi logistik ($i = 1, 2, \dots, p$)

p = Banyaknya variabel predictor

Fungsi di atas berbentuk non linier, sehingga untuk membentuk fungsi linier dilakukan transformasi logit sebagai berikut :

$$\text{logit} [\pi(x)] = \ln \left[\frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} \right] = g(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p$$

$g(x)$ merupakan penduga logit sebagai fungsi linier dari variabel prediktor, dengan kemungkinan nilai peluang terbesar adalah 1.

Berdasarkan model persamaan yang ada di atas, tentunya akan sangat sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Sehingga diperkenalkan sebuah istilah *Odds Ratio* atau yang biasa disingkat $\text{Exp}(B)$ atau *OR*. $\text{Exp}(B)$ merupakan eksponen dari koefisien regresi (e^{β_i}). Dimana jika e^{β_i} bernilai 1 maka antara kedua variabel tersedut tidak berhubungan, dan jika nilai $e^{\beta_i} < 1$ maka antara kedua variabel terdapat hubungan

negatif terhadap perubahan kategori dari nilai X dan demikian pula jika $e^{\beta_i} > 1$ maka antara kedua variabel terdapat hubungan positif terhadap perubahan kategori dari nilai X.

6.4 Pengujian Hipotesis Pada Regresi Logistik

a. Uji Keseluruhan Model

Uji keseluruhan model dilakukan untuk memeriksa peranan variabel prediktor terhadap variabel respon secara serentak atau secara keseluruhan. Uji serentak ini disebut juga uji model *chi square*. Hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut :

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i = 0$$

$$H_1: \text{paling sedikit ada satu parameter } \beta_i \neq 0$$

Statistik uji *G* atau *likelihood Ratio Test* :

$$G = -2 \ln \left[\frac{\left(\frac{n_1}{n} \right)^{n_1} \left(\frac{n_0}{n} \right)^{n_0}}{\prod_{i=1}^n \hat{\pi}_i^{y_i} (1 - \hat{\pi}_i)^{1-y_i}} \right]$$

dimana :

n_1 =banyaknya observasi yang berkategori 1

n_0 =banyaknya observasi yang berkategori 0

Statistik uji *G* mengikuti distribusi *chi-square*, sehingga untuk memperoleh keputusan dilakukan perbandingan dengan nilai χ^2 tabel, dengan derajat bebas (*df*) = *k*-1, *k* merupakan banyaknya variabel prediktor. Kriteria

penolakan (tolak H_0) jika nilai $G > \chi^2_{(df, \alpha)}$ atau jika P-value $< \alpha$.

b. Uji Hipotesis Parsial

Pengujian parsial digunakan untuk menguji pengaruh setiap β_i secara individual dalam model yang diperoleh. Hasil pengujian secara parsial/individual akan menunjukkan apakah suatu variabel prediktor layak untuk masuk dalam model atau tidak. Hipotesis yang digunakan untuk setiap variabel adalah sebagai berikut :

$$H_0: \beta_i = 0$$

$$H_1: \beta_i \neq 0$$

Statistik uji Wald (W):

$$W = \frac{\hat{\beta}_i}{SE(\hat{\beta}_i)}$$

dan

$$SE(\hat{\beta}_i) = \sqrt{(\sigma^2(\hat{\beta}_i))}$$

dimana :

$SE(\hat{\beta}_i)$: dugaan galat baku untuk koefisien β_i

$\hat{\beta}_i$: nilai dugaan untuk parameter β_i

Rasio yang dihasilkan dari statistik uji dibawah hipotesis H_0 akan mengikuti sebaran normal baku, sehingga untuk memperoleh keputusan dilakukan perbandingan dengan distribusi normal baku (Z). Kriteria penolakan (tolak H_0) jika nilai $W > Z_{\frac{\alpha}{2}}$ atau $p\text{-value} < \alpha$.

BAB 7

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WANITA BEKERJA DI WILAYAH PESISIR

7.1. Pengaruh Status Perkawinan Terhadap Peran Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Variabel status perkawinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan wanita bekerja di wilayah pesisir. Dengan kata lain wanita di pesisir dalam membuat keputusan untuk bekerja dan berperan sebagai penguat di dalam ekonomi keluarga tidak mempertimbangkan status perkawinan mereka baik status belum menikah, sudah menikah ataupun janda. Hal ini disebabkan karena kesempatan bekerja untuk wanita belum menikah, sudah menikah dan janda hampir sama untuk wilayah tersebut, sehingga mereka bisa memutuskan untuk bekerja dengan status perkawinan apapun.

Di wilayah pesisir kesempatan berkerja dapat diperoleh oleh semua wanita dengan status perkawinan apapun, sebab jenis pekerjaan yang ada di wilayah pesisir tidak seperti di wilayah kota. Di wilayah kota jenis pekerjaan yang ada secara umum adalah pegawai baik di perusahaan negeri ataupun swasta dengan jam kerja khusus, sehingga sulit bagi wanita yang sudah

menikah untuk membagi perannya. Namun di wilayah pesisir jenis pekerjaan yang adalah seperti mengolah hasil perikanan, bertani, berjualan, membuat kerajinan tangan dan pekerjaan lain yang tidak memiliki jam kerja yang ketat.

7.2. Pengaruh Usia Terhadap Peran Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Variabel usia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan wanita bekerja di wilayah pesisir. Artinya tingkatan usia tidak mempengaruhi keputusan wanita di pesisir untuk ikut bekerja, sehingga dapat dilihat terdapat banyak wanita usia lanjut di pesisir sungai Rokan yang masih ikut bekerja untuk membantu menguatkan perekonomian keluarga. Berdasarkan studi yang dilakukan terdapat 100% responden dari wanita usia lanjut yang masih bekerja. Hal ini disebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita di wilayah pesisir tidak dibatasi oleh usia, selama wanita diusia sudah tidak produktif tersebut masih kuat dan dapat bekerja maka peluang wanita tersebut untuk dapat ikut bekerja masih sama dengan wanita usia produktif.

7.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Peran Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wanita bekerja di wilayah pesisir. Artinya variabel tingkat pendidikan mempengaruhi keputusan wanita di pesisir untuk memutuskan ikut bekerja atau tidak.

Semakin tinggi tingkat pendidikan wanita tersebut, maka semakin besar kemungkinan untuk wanita tersebut membuat keputusan berpartisipasi dalam ekonomi keluarga dengan cara bekerja.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Majid dan Handayani (2012), Rantau and Zain (2013), Christoper, Chodijah dan Yunisvita (2019), Kaarib et al., (2019) dan Hastuty (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan wanita bekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan wanita, maka semakin besar keinginannya untuk bekerja dan menguatkan perekonomian keluarga dan rumah tangga.

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka semakin besar keinginan seorang wanita untuk mengoptimalkan potensinya dan menunjukkan kemampuannya dengan cara bekerja. Pendidikan merupakan investasi modal manusia yang memiliki pengaruh terkuat dalam keputusan memilih pekerjaan (Nasir, 2005). Individu yang berpendidikan tinggi lebih memilih pekerjaan yang berperingkat tinggi. Sehingga, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan dan terhindar dari pengangguran jangka panjang maka individu perlu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

7.4. Pengaruh Jumlah Kepemilikan Balita Terhadap Peran Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Variabel jumlah kepemilikan balita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan wanita bekerja di wilayah pesisir. Artinya wanita yang tidak memiliki balita ataupun memiliki balita, baik sedikit maupun banyak tidak mempengaruhi keputusan seorang wanita di wilayah pesisir untuk bekerja. Hal ini terjadi karena sebagian besar wanita di wilayah pesisir adalah wanita yang sudah tidak memiliki balita sehingga jumlah kepemilikan balita tidak mempengaruhi mereka dalam membuat keputusan bekerja.

7.5. Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Peran Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Variabel jumlah tanggungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan wanita bekerja di pesisir. Hal ini disebabkan karena wanita di pesisir tidak memiliki tanggungan yang cukup banyak. Rata-rata jumlah tanggungan mereka adalah 2 orang, sehingga jumlah tanggungan yang mereka miliki tidak menjadi beban buat mereka. Hal ini disebabkan karena di wilayah pesisir sebagian besar anggota keluarga menjadi tanggungan suami atau pria. Sedangkan wanita yang belum menikah belum memiliki tanggungan dan janda sudah tidak memiliki tanggungan lagi.

7.6. Pengaruh Status Pendapatan Suami Terhadap Peran Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Variabel pendapatan suami memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan wanita bekerja di wilayah pesisir. Artinya variabel pendapatan suami mempengaruhi keputusan wanita di pesisir untuk memutuskan ikut bekerja atau tidak. Semakin rendah pendapatan suami atau tidak ada pendapatan suami sama sekali, maka semakin besar kemungkinan untuk wanita tersebut membuat keputusan berpartisipasi dalam ekonomi keluarga dengan cara bekerja.

Hasil studi ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan Juita et al., (2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwa rendahnya pendapatan suami membuat para wanita memutuskan untuk bekerja, agar dapat membantu memenuhi perekonomian rumah tangga mereka. Karena salah satu motivasi seorang wanita bekerja adalah motif ekonomi. Wanita yang bekerja dengan alasan motivasi ekonomi dilatar belakangi oleh kurangnya jaminan kebutuhan hidup bagi dirinya maupun keluarganya yang seharusnya diperoleh dari suami.

Variabel pendapatan suami memiliki pengaruh yang terbesar dibanding variabel usia, tingkat pendidikan, jumlah balita dan jumlah tanggungan keluarga. Keputusan bekerja wanita untuk menjadi tenaga kerja dilandasi karena ingin mengubah kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih sejahtera.

Perubahan kehidupan ekonomi keluarga dilihat dari tingkat kesejahteraan, gaya hidup, tingkat pendidikan dan lain-lain. Keputusan bekerja wanita dipengaruhi oleh pendapatan

suami yang belum mencukupi kebutuhan keluarga, maka wanita memutuskan bekerja ke luar rumah karena ingin mendapatkan pendapatan keluarga yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya suami yang bekerja.

BAB 8

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPEMILIKIAN SERTIFIKAT HALAL

8.1. Pengaruh Usia Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel usia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di wilayah pesisir dengan nilai *odds ratio* 20,15. Artinya UMKM dengan pelaku usaha wanita yang berusia lebih atau sama dengan 35 tahun memiliki kecenderungan memiliki sertifikat halal 20,15 kali lebih besar daripada UMKM dengan pelaku usaha wanita yang berusia dibawah 35 tahun.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa semakin bertambah usia pelaku usaha wanita dalam UMKM maka semakin sadar bahwa sertifikat halal sangat penting bagi kemajuan usaha yang sedang mereka jalankan. Hal tersebut karena saat ini banyak konsumen yang sudah menyadari bahwa label halal pada produk menjadi hal yang penting bagi mereka dalam memutuskan mengkonsumsi barang/jasa tersebut, sehingga sebagai penyedia produk dan jasa bagi konsumen, maka seorang pelaku usaha harus dapat memahami kondisi dan keinginan konsumen yang ada pada saat ini.

8.2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di wilayah pesisir. Artinya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku usaha wanita di pesisir tidak menjadikan pemilik UMKM untuk sadar dan peduli dalam hal mengurus dan membuat sertifikat halal sebagai legalitas usaha yang mereka miliki.

Hal ini disebabkan karena dalam mengurus sertifikat halal dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha dengan tingkat pendidikan apapun. Apalagi sekarang pemerintah telah memudahkan pengurusan sertifikat halal dengan adanya pendamping pengurusan sertifikat halal yang telah dilatih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sehingga pelaku usaha yang tidak memiliki pengetahuan terkait penggunaan aplikasi pun dapat mengurus sertifikat halal dengan bantuan pendamping yang sudah tersedia di seluruh wilayah Indonesia dengan mudah dan tanpa mengeluarkan biaya sama sekali.

8.3. Pengaruh Jumlah Balita Yang Dimiliki Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel jumlah balita yang dimiliki wanita pelaku usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan

sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di wilayah pesisir dengan nilai *odds ratio* 13,63. Artinya UMKM dengan pelaku usaha wanita yang memiliki balita lebih banyak memiliki kecenderungan memiliki sertifikat halal 13,63 kali lebih besar daripada UMKM dengan pelaku usaha wanita yang tidak memiliki balita.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak balita yang dimiliki oleh pelaku usaha wanita dalam UMKM maka semakin sadar bahwa sertifikat halal sangat penting bagi usaha mereka. Karena dengan kepemilikan balita yang lebih banyak membuat mereka sadar dan berusaha untuk memperbaiki kualitas, kuantitas dan legalitas dari usaha mereka agar usaha mereka dapat bersaing dan bertahan dalam waktu yang lama sehingga dapat menguatkan perekonomian keluarga dan rumah tangga. Dengan memiliki usaha yang kuat dapat bersaing dan bertahan lama, maka dapat menjamin masa depan balita yang mereka miliki.

8.4. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di wilayah pesisir. Artinya berapa pun jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh pelaku usaha wanita di wilayah pesisir tidak menjadikan pemilik UMKM untuk sadar

dan peduli dalam hal mengurus dan membuat sertifikat halal sebagai legalitas usaha yang mereka miliki. Hal ini disebabkan karena dalam mengurus sertifikat halal dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki berapapun adanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka miliki terkait pengurusan sertifikat halal, walaupun mereka sudah lama menjalankan usaha tersebut.

8.5. Pengaruh Lama Usaha Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di wilayah pesisir. Artinya berapa lamapun usaha yang telah dijalani oleh pelaku usaha wanita di pesisir tidak menjadikan pemilik UMKM untuk sadar dan peduli dalam hal mengurus dan membuat sertifikat halal sebagai legalitas usaha yang mereka miliki.

Hal ini disebabkan karena dalam mengurus sertifikat halal dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha tidak ada syarat lama usaha yang sudah dijalani. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka miliki terkait pengurusan sertifikat halal, walaupun mereka sudah lama menjalankan usaha tersebut.

8.6. Pengaruh Jumlah Penghasilan Rata-rata Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel jumlah penghasilan rata-rata UMKM selama sebulan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di wilayah pesisir dengan nilai *odds ratio* 13,63. Artinya Kecenderungan UMKM memiliki sertifikat halal akan naik sebesar 1,23 kali, setiap UMKM tersebut mengalami peningkatan penghasilan sebesar satu juta.

. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa semakin bertambah penghasilan rata-rata perbulan UMKM maka pelaku usaha wanita semakin memiliki peluang besar dalam mengurus sertifikat halal. Karena dengan penghasilan yang sudah semakin besar maka mereka membutuhkan peningkatan kelas dalam legalitas usaha mereka agar usaha yang mereka jalankan semakin bertumbuh dan berkembang. Dengan penghasilan yang ada mereka juga tidak terkendala dalam biaya pengurusan sertifikat halal sehingga lebih mudah dalam hal pemenuhan syarat dan proses pengurusan sertifikat halal.

8.7. Pengaruh *Human Capital* Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel *human capital* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di wilayah pesisir. Artinya berapa baik pun *human capital* yang dimiliki oleh pelaku usaha wanita di Wilayah pesisir tidak menjadikan pemilik UMKM untuk sadar dan peduli dalam hal mengurus dan membuat sertifikat halal sebagai legalitas usaha yang mereka miliki. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka miliki terkait pengurusan sertifikat halal, walaupun mereka sudah lama menjalankan usaha tersebut.

8.8. Pengaruh Kinerja Usaha Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel kinerja usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di Wilayah pesisir. Artinya berapa baik pun kinerja usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha wanita di wilayah pesisir tidak menjadikan pemilik UMKM untuk sadar dan peduli dalam hal mengurus dan membuat sertifikat halal sebagai legalitas usaha yang mereka miliki. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka miliki terkait

pengurusan sertifikat halal, walaupun mereka sudah lama menjalankan usaha tersebut.

8.9. Pengaruh Variabel Interaksi Jenis Usaha dan Lama Usaha Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita

Variabel interaksi jenis usaha dan lama usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dengan pelaku usaha wanita di wilayah pesisir dengan nilai *odds ratio* 11,36. Artinya UMKM dengan jenis usaha makanan dan minuman yang sudah lama menjalankan usaha memiliki kecenderungan memiliki sertifikat halal 11,36 kali lebih besar daripada UMKM dengan jenis usaha lainnya dan baru berdiri.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami jenis usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman memiliki kesadaran yang lebih dalam pengurusan sertifikat halal. Hal tersebut karena saat ini banyak konsumen yang sudah menyadari bahwa label halal pada produk menjadi hal yang penting bagi mereka dalam memutuskan mengonsumsi makanan dan minuman tersebut. Namun, untuk usaha yang bergerak di bidang *fashion*, aksesoris dan kosmetik masih kurang sadar untuk mengurus legalitas usaha mereka khususnya sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M.A. *et al.* (2020) 'Perbedaan Minat Berwirausaha Berdasarkan Jenis Kelamin Mahasiswa', *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(3), pp. 208–215.
- Adom, K. and Anambane, G. (2019) 'Understanding the role of culture and gender stereotypes in women entrepreneurship through the lens of the stereotype threat theory', *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies* [Preprint].
- Al-Qaradawi, Y. (1960) 'Al-Halal wal Haram fi'l Islam', *Trans. Kamal El-Helbawy, M. Moinuddin Suiddiqui, and Syed Shukry (Reviewed by Ahmad Zaki Hammad), The Lawful and the Prohibited in Islam* [Preprint].
- Azam, M.S.E. and Abdullah, M.A. (2020) 'Global halal industry: realities and opportunities', *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5(1), pp. 47–59.
- Bachri, N. *et al.* (2022) 'Women'S Entrepreneurship in Supporting Halal Tourism in Lhokseumawe City', *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 2(1), pp. 49–56. Available at: <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.156>.
- Bakar, A., Pratami, A. and Sukma, A.P. (2021) 'Analisis fiqih industri halal', *Taushiah*, 11(1), pp. 1–13.
- Bastaman, A. and Juffiasari, R. (2015) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Bagi Wanita Untuk Berwirausaha (Studi Kasus Anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DKI Jakarta)', *Prosiding Seminar Nasional 4 UNS SME's Summit & AWARDS 2015*, (4), pp. 265–277. Available at: https://psp-kumkm.lppm.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/21/2016/01/aam-bastaman-prosiding-sme-s-combinedpdf_1.pdf.
- Bohari, A.M., Cheng, W.H. and Fuad, N. (2013) 'An analysis on the competitiveness of halal food industry in Malaysia: an

approach of SWOT and ICT strategy', *Malaysia Journal of Society and Space*, 9(1), pp. 1–11.

Bustamam, N. and Suryani, S. (2021) 'Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau', *Jurnal Ekonomi Kiat*, 32(2), pp. 146–162. Available at: <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>.

Christoper, R., Chodijah, R. and Yunisvita, Y. (2019) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), pp. 35–52. Available at: <https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8820>.

Fathoni, M.A. (2020) 'Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), p. 428. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

Gillani, S., Ijaz, F. and Khan, M.M.S. (2016) 'Role of islamic financial institutions in promotion of Pakistan halal food industry', *Islamic Banking and Finance Review*, 3(01), pp. 29–49.

Hanum, N. and Safuridar, S. (2018) 'Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa', *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), pp. 42–49. Available at: <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.460>.

Hapsari, N.R. and Nurhajjah, S. (2020) 'Apakah Wirausaha Wanita Siap Dalam Menghadapi Era Digital?', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Industri*, 2(2), pp. 20–24.

Hasanah, K. *et al.* (2022) 'Entrepreneur Wanita : Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Dan Pilihan Usaha Di Masa Pandemi Covid - 19 (Woman Entrepreneur : Factors Affecting Business Motivation And Choices In The Covid-19 Pandemic)', 19(01), pp. 61–72.

Hastuty, S. (2016) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Ibu Rumah Tangga pada Usaha Tani Kakao di Desa Padang Kamburi, Kecamatan Buton, Kabupaten Luwu', *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 1(2), pp. 82–89.

- Indonesia, K.K.R. (2019) 'Media Keuangan', *Kementerian Keuangan*, 14, p. 140.
- Jamil, M.A. and Mardiah, S. (2017) 'Eksistensi PKL Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Miskin', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), pp. 17–34.
- Juita, F., Mas'ad, M. and Arif, A. (2020) 'Peran Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), p. 100. Available at: <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2916>.
- Kaarib, A., Kamarni, N. and Purwasutrisno (2019) 'Determinan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sumatera Barat', *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(3), pp. 1–9.
- Kamila, E.F. (2021) 'Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal', *Jurnal Likuid*, 1(01), pp. 33–42.
- Kuratko, D.F. and Audretsch, D.B. (2009) 'Strategic entrepreneurship: exploring different perspectives of an emerging concept', *Entrepreneurship theory and practice*, 33(1), pp. 1–17.
- laura Hardilawati, W. (2020) 'Strategi bertahan UMKM di tengah pandemi covid-19', *jurnal akuntansi dan ekonomika*, 10(1), pp. 89–98.
- Majid, F. and Handayani, H.R. (2012) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Berstatus Menikah untuk Bekerja (Studi Kasus Kota Semarang)', *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), pp. 1–9.
- Misdawita, M. and Utami, B.C. (2022) 'Analysis of Factors Affecting the Income of Working Women', *International Journal of Management and Business Applied*, 1(2).
- Mujahidin, M. (2020) 'The Potential Of Halal Industry In Indonesia To Support Economic Growth', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), pp. 77–90. Available at: <https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i1.1433>.
- Nasution, L.Z. (2020) 'Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing

- Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan', *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), pp. 33–57.
- Nisha, N. and Iqbal, M. (2017) 'Halal ecosystem: prospect for growth in bangladesh', *International Journal of Business and Society*, 18(S1), pp. 205–222.
- Noordin, N., Noor, N.L.M. and Samicho, Z. (2014) 'Strategic approach to halal certification system: An ecosystem perspective', *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, pp. 79–95.
- Nurhaeni, I.D.A. *et al.* (2022) 'Gendered-Perspective Agile Leadership in the VUCA Era During the Covid-19 Pandemic', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), pp. 119–136.
- Prayitno, I. (2003) *Wanita Islam perubah bangsa*. Pustaka Tarbiatuna.
- Pujayanti, D.A. (2020) 'Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0', *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(01), pp. 20–33.
- Puspitasari, A. (2012) 'Pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap komitmen organisasi dengan kepuasan kerja', *JEJAK*, 5(1).
- Rantau, D.C.M. and Zain, I. (2013) 'Analisis Regresi Double Hurdle terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan Kawin dalam Kegiatan Ekonomi di Jawa Timur', *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2(2), pp. D129–D134.
- Reuters, T. and Standard, D. (2015) 'State of the global Islamic economy report 2015/16', *Thomson Reuters, Dubai the Capital of Islamic Economy, Dinarstandard, NY*, pp. 20–36.
- Rini, J.F. (2002) 'Wanita bekerja', *Jakarta [diakses tanggal 2 September 2019]*. Tersedia dari <http://www.e-psikologi.com/epsi/search.asp> [Preprint].
- Rosiana, D. (2007) 'Mengatasi Konflik Peran Sebagai Karyawan Dan Ibu Rumah Tangga Pada Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia', *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 23(2), pp. 271–287. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/7341-ID-mengatasi-konflik-peran-sebagai-karyawan-dan-ibu-rumah-tangga-pada-tenaga-kerja.pdf>.

- Shalihin, N. and Firdaus, F. (2019) 'Transformasi gender: Strategi pembebasan perempuan dari jerat pembangunan dan kapitalisme', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), pp. 109–140.
- Subarkah, A.R. (2018) 'Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat)', *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), pp. 49–72.
- Sudarta, W. (2014) 'Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender', *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, pp. 1–2.
- Suyadi, Syahdanur and Suryani, S. (2018) 'Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Wilayah pesisir Riau', *Jurnal Ekonomi*, 29(1), pp. 1–10.
- Tuwu, D. (2018) 'Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), p. 63. Available at: <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>.
- Vanomy, A.E. and Harris, I. (2021) 'Analisis Peran Wanita Generasi Milenial pada Usaha Mikro Kecil Menengah di dalam Era Ekonomi Digital di Kepulauan Riau Indonesia', *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8(2), pp. 300–310. Available at: <https://doi.org/10.26905/jbm.v8i2.6167>.
- Waharini, F.M. and Purwantini, A.H. (2018) 'Model pengembangan industri halal food di Indonesia'.
- Yusrini, B.A. (2017) 'Tenaga kerja wanita dalam perspektif gender di Nusa Tenggara Barat', *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), pp. 115–131.

GLOSARIUM

Analisis

Proses menganalisa sebuah data yang ada.

Bekerja

Kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat).

Data

Rincian dari sejumlah informasi numerik.

Gender

Sesuatu yang mengacu pada karakteristik seseorang, termasuk peran, perilaku, ekspresi, dan identitas, yang dibangun secara sosial.

Halal

Diizinkan (tidak dilarang oleh syarak)

Kepemilikan

Kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi

Odds Rasio

Konsep penting yang digunakan untuk mengukur peluang atau probabilitas suatu kejadian terjadi

Peran

Bentuk perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu

Pesisir

Wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan.

Regresi

Metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih

Sertifikat

Tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian:

Signifikan

Bermakna, penting.

Statistik

Suatu kumpulan teori dan metodologi yang digunakan untuk menganalisis bukti-bukti numerik guna menetapkan satu dari beberapa alternatif keputusan atau tindakan dimana tidak semua fakta yang relevan diketahui. Suatu metodologi pengumpulan keputusan atau tindakan berdasarkan data atau informasi yang dikumpulkan secara sistematis.

Statistika

Ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif.

Teori

Pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian dan sebagainya).

Tenaga Kerja

Telompok yang berada pada usia produktif dan mampu untuk melakukan pekerjaan.

Usaha

Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud

Variabel

Objek penelitian yang bervariasi, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian

Wilayah

Zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan, suatu area yang saling berhubungan satu sama lain

Wirausaha

Proses mendefinisikan, mengembangkan, dan mencapai visi yang berpuncak pada berdirinya sebuah bisnis atau usaha.

PROFIL PENULIS

Penulis 1



Identitas Diri

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Misdawita, S.Si., M.S.E. |
| 2. Kelahiran | : Pekanbaru/04 Oktober 1988 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. vPekerjaan | : Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fak.
Ekonomi Universitas Riau
(NIP.198810042019032017) |
| 5. Pangkat/Golongan/Jabatan | : Penata Muda Tingkat 1/IIIb /
Asisten Ahli |
| 6. Bidang Keahlian | : Ekonomi Pembangunan |
| 7. Alamat | : Jalan Angkatan 66 No.56 RT.2 RW.1
BambuKuning Tenayan Raya
Pekanbaru Riau |
| 7. HP | : 085265858063 |
| 8. Email | : misdawita@lecturer.unri.ac.id
misdawita04@gmail.com |

Pendidikan Formal

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD), di SD Negeri 017 Pekanbaru, tamat tahun 2001
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di SMP Negeri 04 Pekanbaru, tamat tahun 2004
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Jurusan IPA SMA Negeri Plus Provinsi Riau, tamat tahun 2007.
4. **S.Si.** Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, tamat tahun 2011
5. **M.S.E.** Program Pasca Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, tamat tahun 2014.

Pengalaman Kerja

1. 2019 – sekarang, dosen tetap Program Sarjana (S1) Ekonomi Pembanguna di FEB Universitas Riau
2. 2015 – 2019 , dosen tetap di STIE Mahaputra Pekanbaru, Riau
3. 2009 – 2019, Pengajar Matematika di BKB Nurul Fikri.
4. 2013 – 2015, Pengawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Universitas Indonesia
5. 2013 – 2014 Asisten Dosen Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FE UI

Penelitian

Tahun 2020

- a. Faktor Penentu Akses Dan Permintaan Kredit Agroindustri Gula Aren Di Kabupaten Rokan Hulu (Anggota).
- b. Kesiapan UMKM Kreatif Berbasis Ekonomi Digital (Economy Digital) Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 (Anggota).

Tahun 2021

- a. Kajian Pengembangan Komoditas Unggulan Potensi Lokal Bagi Pembangunan Wilayah Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi (Anggota)
- b. Pengaruh Religiusitas, Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Lembaga Amil Zakat Terhadap Intensi Muzakki Membayar Zakat Profesi Di Kota Pekanbaru (Anggota).

Pengabdian

Tahun 2020

- a. Sosialisasi Sistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bagi Anggota IKM Gula Aren Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2020 (Anggota).
- b. Penguatan Peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak (Anggota).

Tahun 2021

- a. Sosialisasi Pemanfaatan Sampah Organik Agar Bernilai Ekonomis Dengan Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (Ketua).
- b. Sosialisasi Desain Desa Wisata Logas Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Potensi Alam (Anggota).
- c. Pelatihan Diversifikasi Produk Berbahan Baku Lokal Pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar (Anggota).

Publikasi

- a. Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 4 (2), 147-161 | vol: | issue : | 2013.
- b. *Impacts Of Food Prices On The Economy: Social Accounting Matrix And Microsimulation Approach In Indonesia* Review of Urban & Regional Development Studies 31 (1-2), 137-154 | vol: | issue : | 2019.
- c. Analisis Aspek Ekonomi Dan Sosial Kota Pekanbaru Sebagai Kota Layak Huni. Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah. Vol 4. No.2. 2021.
- d. *The Exploratory Factor Analysis on Firms Performance of Micro and Small Enterprises in Indonesia. Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore 2021.*
- e. Penentuan Penggunaan Lahan Gambut Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Planologi Vol.18 No.2. 2021.

Penulis 2



Identitas Diri

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Lapeti Sari, SE, M.Si |
| 2. Kelahiran | : Jambi, 3 April 1963 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Pekerjaan | : Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fak.
Ekonomi Universitas Riau
(NIP. 19630403 198903 2 003) |
| 6. Pangkat/Golongan/Jabatan | : Pembina Tk I / IV-b /
Lektor kepala |
| 7. Bidang Keahlian | : Ekonomi Sumber Daya Manusia |
| 8. Alamat | : Jl. Akasia No. 75, RT 1/RW11
Rejosari Pekanbaru |
| 9. HP | : 081371875938 |
| 10. Email | : lapeti.sari@lecturer.unri.ac.id |

Pendidikan Formal

1. **S.E.** Program Studi Ekonomi pembangunan Jurusan Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Usaha Universitas Riau, tahun 1983-1987
2. **M.Si.** PPn Universitas Andalas, tahun 2004- 2006.

Penelitian

Tahun 2015

- a. Analisis Capaian Pembangunan Manusia Antara Riau Daratan Dan Riau Pesisir (ketua)

Tahun 2016

- a. Analisis Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Sagu Kecamatan Tebing Tinggi Timur (anggota)
- b. Analisa Kinerja PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Kampar (anggota)
- c. Estimasi Nilai Manfaat Ekonomi Relokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Dengan Menggunakan Metode Harga Hedonis di Kota Pekanbaru (anggota).

Tahun 2017

- a. Analisis Struktur Tenaga Kerja Perempuan di Provinsi Riau (ketua)

Tahun 2018

- a. Analisis Kemiskinan di Provinsi Riau (ketua)

Tahun 2019

- a. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau Tahun 2010-2017 (ketua)

Tahun 2020

- a. Analisis Potensi Ekonomi Agrowisata Desa Sungai Geringging Kabupaten Kampar (anggota)

Tahun 2021

- a. Policy Recommendation Dalam Pengembangan Potensi Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar (anggota)
- b. Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau (anggota)

Publikasi

- a. Pemetaan Perempuan di Sektor Industri Se- Provinsi Riau Jurnal Puanri, Vol 5 No. 1 Juni 2010. ISSN: 1907-7386.
- b. Penyerasian Kebijakan Kependudukan di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi, Vol 18 No. 2 Juni 2010. ISSN: 0853 7593.
- c. Ketersediaan Pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ekonomi, Vol 18 No. 2 Juni 2010. ISSN: 0853 7593

- d. Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kampar. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Th I No. 1 Nov 2010. ISSN: 2087-4502
- e. Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ekonomi, Vol 19 No. 1 Maret 2011. ISSN: 0853 7593
- f. Identifikasi Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Daerah Pertanian dan Perkebunan). Jurnal Ekonomi, Volume 19 No. 3 Sept 2011, ISSN: 0853 7593.
- g. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Th I No. 1 Nov 2011. ISSN: 2087-4502.
- h. Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru. Jurnal ISBN: 978-979-792-333-4
- i. Pelayanan Administrasi Kependudukan Sebagai Bentuk Pelayanan Pemerintahan yang Berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Th III No. 8 Maret 2011. ISSN: 2087-4502.
- j. Analisis Faktor-faktor Penentu Konversi Lahan di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi, Vol 23, No.3, Sept 2015, ISSN 0853-7593
- k. Poverty Analysis in Riau Province. Gis Business.
- l. Analysis of Human Development Index (HDI) in Riau Province. Gis Business.

Penulis 3



Identitas Diri

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Bunga Chintia Utami,S.IP,ME |
| 2. Kelahiran | : Medan/22 Agustus 1989 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Pekerjaan | : Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi dan Usaha Universitas Riau
(NIP. 19890822201932015) |
| 5. Pangkat/Golongan/Jabatan | : Penata Muda Tingkat 1/IIIB /
Asisten Ahli |
| 6. Bidang Keahlian | : Ekonomi Kebijakan Publik |
| 7. Alamat | : Jalan Bina Widya UNRI |
| 8. HP | : 085271686277 |
| 9.Email | : bungachintiautami@lecturer.unri.ac.id |

Pendidikan Formal

1. **S.IP.** Administrasi Negara, Universitas Andalas, tahun 2007-2012
2. **M.E.** Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, tahun 2012- 2014

Penelitian

Tahun 2014

- a. Analisis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kinerja perekonomian (ketua)

Tahun 2015

- a. Kajian Kebijakan dan pengembangan penanaman modal (ketua)

Tahun 2016

- a. Implementasi Peraturan Pemerintah RI No.17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan oleh Badan Ketahanan Provinsi Riau (ketua)

Tahun 2017

- a. Proyek Kebutuhan Pegawai Universitas Lancang Kuning (ketua)

Tahun 2018

- a. Persepsi Mahasiswa terhadap Kualitas Pelayanan (Studi kasus di Bagian Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning) (ketua).
- b. Konsistensi Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Legislatif di Provinsi Riau (Anggota)

Tahun 2020

- a. Neo-endogenous model dalam pembangunan Pedesaan di desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar (ketua)

Tahun 2021

- a. Policy Recommendation Dalam Pengembangan Potensi Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar (ketua)

Publikasi

- a. *Implementation Of Program The Village Empowerment In Riau Province*. Jurnal Niara Fak. Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. eISSN 2528-7575, Hlm. 8-22 . Volume 9, No.2, Januari 2017.
- b. Pelatihan Pelayanan Prima Tentang Perilaku Pemberi Layanan Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Warta LPM. Nomor 20 volume 2 Halaman 61-66 tahun 2017.
- c. Road map Bureucracy reform public service government Riau Provinsi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan pembangunan Daerah. Nomor 4 volume 4 halaman 231-244 tahun 2017

- d. Strategi Pengoptimalan pencapaian Program Upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera pada direktorat pemberdayaan ekonomi keluarga dan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Jurnal Niara. Nomor 2 Volume 9, Halaman 23-42 tahun 2017.
- e. Cleanliness Policy Implementation : Evaluating Retribution Model To Rise Public Satisfication. IOP Confrence Series: Earth and Environtment Science. 156 (1), 012011,2018.
- f. Need Analysis Of Employment in Riau Main Island : A Reflection from Universitas Lancang Kuning. IOP Confrence Series: Earth and Environtment Science. 156 (1), 012057,2018.
- g. *The Consistency of Political Party in Legislative Recruitment Candidates on Election 2019*. Journal of Election and Leadership. 1 (1), 44-56
- h. *Distortion of Government Policy Orientation in Public-Private Partnership (PPP)* . Policy & Governance Review. 4 (1), 40-54 .
- i. *Environmental Development Strategy Industry. Case Study on Historical Tour Industry*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 469 (2020) 012116
- j. Water Supply and Sanitation: Problems on Community Empowerment Based Program in Indragiri Hulu, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020.
- k. Inovasi Pelayanan Publik Di Desa Seberang Taluk Kabupaten Kuantan Singingi . Jurnal Niara. 13 (1), 237-244, 2020
- l. Keadilan Spasial Dan Keseimbangan Kebutuhan Lokal Dalam Neo-Endogenous Model Pembangunan Pedesaan Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Jurnal Niara. Vol. 13, No. 2 Januari 2021, Hal. 83-91